

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **III. 1. Kesimpulan**

Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap menjalankan aktivitas pembangunan dan pengembangan untuk terus meningkatkan kemakmuran. Namun demikian, peningkatan ekonomi dan pembangunan tersebut juga diikuti dengan berbagai macam masalah dimana salah satunya adalah masalah lingkungan terutama dari limbah. Permasalahan limbah mungkin tidak dirasakan oleh beberapa kalangan masyarakat namun dampak dari limbah yang tidak terkelola dengan baik tetap mengancam kualitas hidup terutama pada mereka yang kurang mampu. Selain dampak sosial, limbah yang tidak terkelola juga berkontribusi pada penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Limbah yang dibiarkan menumpuk tanpa ada pengolahan yang baik akan mengeluarkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang kuat dan dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan manusia yang rutin terpapar gas tersebut. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan target dan komitmen Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki keadaan lingkungan Indonesia serta mensejahterakan masyarakatnya.

Walaupun demikian, sedikit upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah limbahnya yang dewasa ini telah menggunung dan bahkan telah meluap ke perairan di Indonesia. Ketidakmampuan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan limbah tersebut terletak pada aspek biaya dan pengetahuan atas sistem pengelolaan limbah yang baik. Sebagai negara yang sedang berkembang, banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dialokasikan terhadap sektor-sektor yang dinilai lebih strategis ataupun signifikan seperti pembangunan infrastruktur. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa sektor lingkungan terutama pengelolaan lingkungan hidup juga dapat menjadi sektor yang strategis. Hal tersebut juga didorong dengan meningkatnya keinginan sektor swasta untuk melakukan aktivitas serta investasi yang bersifat berkelanjutan.

Tidak hanya itu, dengan kemajuan teknologi limbah dapat dikonversikan menjadi energi yang bersifat ramah lingkungan yang juga dapat menjawab permasalahan Indonesia mengenai peningkatan permintaan listrik. Lagi-lagi, Indonesia pun mengalami kendala dalam hal tersebut dimana Indonesia masih kurang dalam segi pengalaman serta pengetahuan mengenai perubahan sampah menjadi energi.

Kerjasama Indonesia dengan negara Denmark pada sektor lingkungan dan energi melalui *Environmental Support Program – Phase III* (ESP3) merupakan pintu bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ketidaklayakannya pengelolaan limbah di Indonesia. Dengan bantuan dana yang cukup besar serta pengalaman Denmark selama 30 tahun dalam mengatasi dan merubah kebijakan pengelolaan limbahnya, Denmark menjadi kandidat yang tepat untuk membantu Indonesia menangani masalah yang serupa. Sektor swasta Denmark juga memiliki kapasitas teknologi yang memadai sehingga hal tersebut juga dapat membuka dan mendorong kerjasama komersil di masa depan.

Dalam melihat kerjasama tersebut, penulis melihat adanya faktor PE dalam tujuan kerjasama tersebut. Hal itu disebabkan karena menurut PE, kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat kalangan bawah adalah hasil dari aktivitas ekonomi-politik kalangan atas yang seringkali tidak mengalami ataupun merasakan dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi dan menangani kerusakan lingkungan tersebut juga harus berasal dari perubahan terhadap aktivitas ekonomi-politik. Di dalam negaranya sendiri, Denmark menyadari bahwa pengelolaan limbah yang mereka jalani telah merusak serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar dan mereka yang bekerja di sektor tersebut. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah Denmark untuk segera merevisi dan mencari solusi terbaik untuk mengelola limbahnya secara berkelanjutan. Kerjasama Indonesia dengan Denmark melalui ESP3 ini mendorong pengaruh PE yang jarang terlihat dalam aktivitas ekonomi-politik Indonesia.

Implementasi dari proyek pilot ESP3 yang dilakukan di provinsi Jawa Tengah merupakan suatu aktivitas yang terbilang kompleks. Secara structural, proyek pilot di Provinsi Jawa Tengah sudah terimplementasikan sesuai dengan variable-variable yang dikemukakan Grindle. Dalam MoU serta Perjanjian Implementasi yang diperoleh dari KLHK, dijelaskan tentang kepentingan dari serta manfaat yang akan diterima oleh kelompok penerima yakni Indonesia dimana kepentingan tersebut adalah untuk memenuhi target pengurangan kontribusi gas rumah kaca serta pengurangan volume limbah di Indonesia. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, tingkat perubahan yang diharapkan dapat dicapai dari implementasi proyek pilot juga teridentifikasi dimana setelah proyek pilot berhasil dijalankan secara operasional, terutama untuk proyek RDF di Cilacap, volume sampah di TPA dapat berkurang secara signifikan.

Aktor-aktor yang akan terlibat dan mengimplementasikan proyek pilot tersebut juga disebutkan dalam Perjanjian Implementasi dimana campuran dari pihak Denmark dan pihak Indonesia menduduki posisi PCU dan NCU. Pembiayaan serta alokasi dana pun yang diberikan oleh pemerintah Denmark telah ditentukan secara spesifik dalam Perjanjian Implementasi.

Namun, hasil dari implementasi proyek pilot yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah belum dapat dilihat atau dianalisis dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan proyek pilot tersebut belum rampung akibat banyaknya kendala-kendala yang akhirnya menunda proyek untuk diimplementasikan secara tepat waktu. Maka dari itu secara hasil, proyek pilot dari ESP3 belum dapat dikatakan memberikan hasil nyata bagi daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kurangnya aspek *good governance* dari pihak Indonesia juga memunculkan beberapa risiko dan tantangan dalam mengimplementasi proyek pilot EPS3. Beberapa proyek pilot juga dipegang dan diawasi oleh beberapa kementerian dimana hal tersebut menciptakan tantangan komunikasi dari pihak ESP3. Walaupun secara umum kinerja pihak Indonesia menunjukkan tingkat kooperatif dan komitmen yang tinggi, hal tersebut tidak selalu diterjemahkan dengan baik secara praktik dan di lapangan.

Namun demikian, implementasi proyek-proyek pilot di Jawa Tengah terutama untuk proyek RDF di Cilacap dan PLTSa di TPA Jatibarang telah berhasil menunjukkan baik kepada pemerintah Indonesia maupun masyarakat lokal bahwa teknologi untuk mengelola limbah yang lebih berkelanjutan sudah ada dan dapat dilakukan di Indonesia. Beberapa kalangan pada awalnya menentang teknologi seperti WtE dengan asumsi bahwa WtE menimbulkan lebih banyak ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan melalui abu dari pembakarannya. Namun dengan kemajuan teknologi serta membangun kesadaran di kalangan masyarakat awam, proyek WtE kedepannya dapat menjadi opsi pengelolaan limbah yang diprioritaskan.

Secara garis besar, program-program dalam kerjasama ESP3 terutama untuk komponen 1 dan komponen 2 telah terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut juga telah membuka jalan bagi pemerintah Denmark dan pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama lanjutan yaitu SSC dan *Sustainable Island in Indonesia* (SII). Proyek pilot yang berada dibawah ESP3 pun juga sudah terimplementasikan dengan baik dan telah menghasilkan hasil nyata yaitu dengan dibangunnya pabrik-pabrik pembangkit listrik di Cilacap dan di Kota Semarang.

## VI. 2. Saran

- **Saran kepada Pemerintah Indonesia**

Dalam suatu proses implementasi kerjasama guna memenuhi dan mencapai tujuan serta target yang telah diterapkan baik dalam MoU ataupun dokumen perjanjian lainnya, alangkah baiknya apabila Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan konsistensi dalam mendukung program-program kerjasama tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan *good governance* baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal yang tentunya akan membuat proses implementasi dari suatu program akan berjalan lebih lancar.

- **Saran untuk peneliti/penelitian selanjutnya**

Berhubungan penelitian ini belum mampu untuk menunjukkan hasil konkrit dari proyek pilot ESP3 karena belum rampungnya proyek tersebut serta

keterbatasan data yang diperoleh, alangkah baiknya untuk peneliti atau penelitian selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut dampak yang telah terjadi setelah proyek pilot di Provinsi Jawa Tengah tersebut selesai sepenuhnya.